

Tata Beracara DPRD Kabupaten Solok

2025

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD) NOMOR 3
TAHUN 2025, BD.2025/No. 9, LL SETDA KAB. SOLOK: 23 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG KODE ETIK

- ABSTRAK : • bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, sehingga diperlukan pedoman tata beracara guna menunjang kinerja dan penindakan pelanggaran Kode Etik;
- bahwa Peraturan DPRD ini mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pengaduan, registrasi perkara, pemeriksaan pendahuluan, alat bukti dan pembuktian, tata tertib persidangan, hak dan kewajiban para pihak, pengambilan keputusan, hingga prosedur penjatuhan sanksi dan rehabilitasi;
 - bahwa peraturan ini juga menetapkan tahapan persidangan yang transparan dan akuntabel, termasuk mekanisme penanganan apabila Pimpinan atau Anggota Badan Kehormatan sendiri yang menjadi teradu, serta klasifikasi sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, pemberhentian dari pimpinan alat kelengkapan, hingga usulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD. Dasar hukum Peraturan DPRD ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi

Sumatera Barat; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan DPRD ini menjadi landasan operasional bagi Badan Kehormatan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

- Selain itu, peraturan ini menyempurnakan materi dan sistematika pengaturan tata beracara dari regulasi sebelumnya. Dengan berlakunya peraturan ini, proses penegakan Kode Etik di lingkungan DPRD Kabupaten Solok memiliki kepastian hukum dan prosedur yang jelas demi terjaganya marwah lembaga perwakilan rakyat daerah.

Catatan : • Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 9.

- Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi